

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pesatnya laju pertumbuhan penduduk di Indonesia yang tidak diimbangi dengan kualitas sumber daya manusia yang memadai dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan (Raikhani et al., 2018). Salah satu masalah utama di Indonesia adalah jumlah penduduk yang besar dan tidak sebanding dengan kemampuan sumber daya manusia yang dapat menimbulkan masalah/ jika melampaui kapasitas negara (Hidayati et al., 2020). Pada tahun 2017, pertumbuhan penduduk Indonesia mencapai 1,49% (BPS, 2017) yang dipengaruhi oleh tiga faktor utama kelahiran (*fertilitas*), kematian (*mortalitas*), dan perpindahan penduduk (*migrasi*). Semakin tinggi laju pertumbuhan penduduk, semakin besar upaya yang dibutuhkan untuk mengendalikan dan menekannya. Provinsi DKI Jakarta dengan populasi 10.679.951 jiwa (BPS,2022), mengalami peningkatan tipis sekitar 0,66% dibandingkan pada tahun sebelumnya. Populasi DKI Jakarta setara dengan 3,87% dari total populasi Indonesia yang berjumlah 275,77 juta jiwa pada tahun 2022, menjadikannya provinsi dengan jumlah penduduk terbesar keenam secara nasional.

Pada enam wilayah yang ada di DKI Jakarta yaitu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terpadat di antara enam kota di Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan data kependudukan jumlah penduduk Kota Administrasi Jakarta Timur mencapai 3.083.883 jiwa atau 28,86% dari total penduduk di DKI Jakarta (BPS, 2022). Dengan permasalahan kependudukan

menjadi isu penting yang harus segera diatasi dengan memanfaatkan peluang yang ada, sehingga solusi yang dihasilkan dapat berjangka panjang dan berkelanjutan. Strategi pemerintah harus mampu menciptakan program yang efektif dalam menghambat laju pertumbuhan penduduk, dengan mengandalkan partisipasi aktif masyarakat, meskipun *public interest* yang sulit dikendalikan.

Jumlah penduduk yang diperkirakan terus mengalami peningkatan dan dapat menyebabkan kepadatan penduduk yang tidak terkendali. Hal ini akan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat secara signifikan, termasuk kualitas hidup, pembangunan nasional, keberlanjutan penduduk maju atau *smart people*, serta kondisi ekonomi setempat. Untuk mengatasi masalah tingginya pertumbuhan penduduk, Indonesia menerapkan Program Keluarga Berencana (KB) yang mirip dengan kebijakan *one child policy* di China serta Singapura dengan program *stop at two*. Program Keluarga Berencana (KB) bertujuan untuk menekan dan mengendalikan angka fertilitas di Indonesia, yang akan berdampak pada tingkat kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Pemerintah membentuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai lembaga khusus yang menangani program Keluarga Berencana (KB), dengan struktur yang mencakup hingga tingkat kelurahan/desa.

Presiden Republik Indonesia pertama kali mencanangkan Kampung KB pada tanggal 14 Januari 2016 dengan pencanangan di 514 kabupaten/kota. Pada tahun 2017 pembentukan Kampung KB di 7.160 kecamatan, dan pada tahun 2018 di 6.727 desa yang sangat tertinggal. Pada tahun 2019, Kampung KB diperkuat melalui penunjukan Kampung KB percontohan dan pelatihan. Hingga tahun 2021,

sebanyak 16.927 Kampung KB telah diklasifikasikan berdasarkan kualitas pengelolaannya. (BKKBN, 2022).

Pada laporan tahunan BKKBN tahun 2018, hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berkualitas sebagai fungsi keluarga berencana belum dapat berjalan dengan optimal seperti yang diharapkan. Dalam evaluasi tersebut menunjukkan bahwa salah satu faktor penyebab ketidakberhasilan program ini adalah kurangnya komitmen, serta integrasi program, dan kegiatan lintas sektor. Hal ini terjadi karena belum adanya kebijakan dan kurangnya prosedur tertulis tentang keterlibatan lintas sektor. Banyak program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga yang memiliki potensi untuk bekerja sama dengan baik yang berbasis desa di Kampung Keluarga Berkualitas, seperti Desa Siaga STBM (Kementerian Kesehatan), Kampung Sejahtera Mandiri (Kementerian Sosial), Desa Mandiri (Kementerian Desa PDTT), Desa Keluarga Sakinah (Kementerian Agama), Desa Tangguh Bencana (BNBP), Desa Sadar Hukum (Kementerian hukum dan HAM), dan program kementerian lainnya.

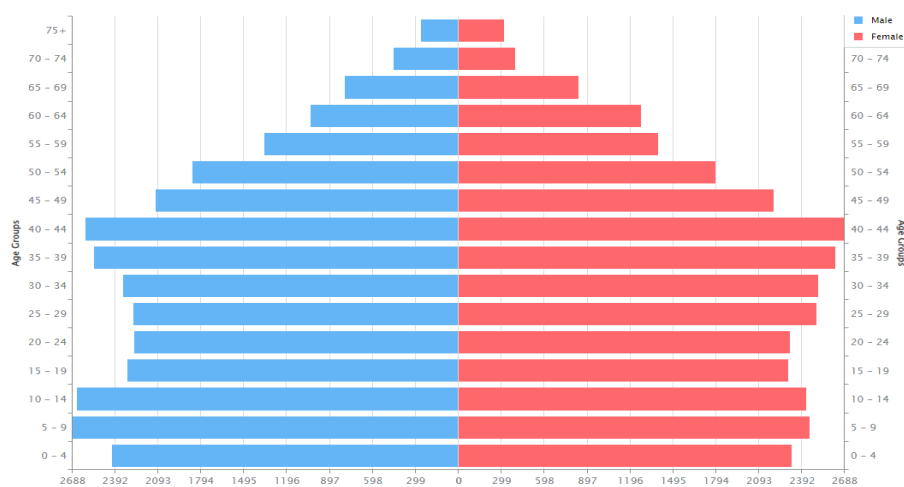
Pada tanggal 15 April 2020, melalui surat edaran Kemendagri No. 834.4/2879/SJ Tahun 2020, nomenklatur Kampung Keluarga Berencana diubah menjadi Kampung Keluarga Berkualitas. Dalam perubahan ini menunjukkan betapa pentingnya peran kampung keluarga berkualitas dalam mengembangkan kualitas sumber daya manusia dan keluarga di Indonesia. Kemudian, Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2022 dikeluarkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan Kampung Keluarga Berkualitas. Dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) ini

diharapkan dapat mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan Kampung Keluarga Berkualitas dan menjadikannya gerakan bersama yang terintegrasi dalam pemberdayaan serta penguatan keluarga dengan seluruh dimensinya, guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia, keluarga, dan masyarakat. Merujuk pada Agenda Prioritas Pembangunan, khususnya poin ketiga mengenai pembangunan yang dilakukan dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa-desa dalam kerangka negara kesatuan. Agenda prioritas pembangunan ini menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengupayakan Pembangunan kependudukan dari pinggiran atau desa. Jika Pembangunan dapat maju di semua desa, maka setiap desa akan maju, dan ini akan berdampak pada kemajuan negara secara keseluruhan.

Keberhasilan Program Kampung Keluarga Berkualitas dapat di evaluasi dari berbagai aspek. Pertama, aspek pengendalian kuantitas penduduk melalui pengaturan fertilitas, penurunan mortalitas, dan pengarahannya mobilitas. Kedua, aspek peningkatan kualitas penduduk, yang dapat dilihat dari beberapa indikator seperti peningkatan jumlah pengguna KB baru, peningkatan jumlah ibu hamil dan menyusui yang mendapatkan pelayanan kesehatan, peningkatan partisipasi remaja dalam kegiatan Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-R), penurunan jumlah Perempuan buta aksara, serta peningkatan partisipasi keluarga pra Sejahtera dan KS-1 dalam kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS). Indikator-indikator ini adalah penjabaran dari delapan fungsi keluarga yang terdapat dalam Peraturan Presiden No.87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan

Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga, yang meliputi fungsi keagamaan, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi, serta pembinaan lingkungan. Manfaat Kampung Keluarga Berkualitas terletak pada kemampuan membangun masyarakat berbasis keluarga melalui delapan fungsi keluarga dan mewujudkan kesejahteraan bersama melalui integrasi program lintas sektor.

Tingginya pertumbuhan penduduk di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur, Pemerintah DKI Jakarta mencanangkan Kampung Keluarga Berkualitas pada tanggal 18 Oktober 2018 di RPTRA Jaya Makmur, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Adapun jumlah penduduk Kampung Keluarga Berkualitas Kelapa Dua Wetan menurut kelompok umur dan jenis kelamin, sebagai berikut:



Gambar 1. 1 Grafik Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kelurahan Kelapa Dua Wetan

Sumber : BKKBN, 2022

Berdasarkan grafik di atas jumlah penduduk di Kelurahan Kelapa Dua Wetan mencapai 60.176 jiwa, dengan 29.910 jiwa laki-laki dan 30.266 jiwa perempuan, serta terdapat 13.390 KK, dan Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) 8.802 jiwa

dengan tingkat Ingin Anak Segera (IAS) sejumlah 1.607 jiwa. Dalam hal ini, permasalahan tingkat kepadatan penduduk sangat tinggi, sehingga dibentuklah Kampung Keluarga Berkualitas di Kelurahan Kelapa Dua Wetan sebagai langkah untuk mengatasi masalah tersebut. Dalam rangka memperkuat dan memudahkan kinerja pemerintah dalam menjamin kebutuhan pokok masyarakat serta mewujudkan keluarga sejahtera, berbagai *stakeholder* (pemerintah, swasta, dan masyarakat umum) dilibatkan pada program Kampung Keluarga Berkualitas. Kegiatan yang telah dilakukan mencakup Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPPKA), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R), dan Rumah Data Kependudukan Kampung KB (Rumah Dataku). Dalam pelaksanaan program-program tersebut, kolaborasi dan koordinasi dilakukan bersama *stakeholder* (pemerintah, swasta, dan masyarakat umum) sesuai dengan peran mereka dalam program tersebut.

Pelaksanaan kegiatan program Kampung Keluarga Berkualitas di Kelurahan Kelapa Dua Wetan dibentuklah Kelompok kerja (Pokja) yang dapat membantu dalam melaksanakan program-program di Kampung Keluarga Berkualitas. Kelompok kerja Kampung KB Kelapa Dua Wetan memiliki hubungan yang erat dengan para tokoh masyarakat sekitar yang ditunjukkan dengan pendampingan dan partisipasi tokoh masyarakat dalam kegiatan program Kampung KB. Di samping itu, kelompok kerja Kampung Keluarga Berkualitas Kelapa Dua Wetan dikenal keaktifannya dalam melaksanakan program-program yang ada di Kampung KB. Eksistensi dan semangat kelompok kerja tersebut menimbulkan keuntungan

tersendiri untuk pemerintah setempat karena adanya kontribusi langsung bagi masyarakat dalam mengatasi permasalahan kesejahteraan keluarga. Adanya hubungan yang cukup baik antara kelompok kerja dengan masyarakat memudahkan kelompok kerja untuk melaksanakan berbagai upaya dalam meningkatkan kualitas sumber daya dan kualitas keluarga. Dengan aktifnya Kampung Keluarga Berkualitas ini dapat menarik kolaborasi dengan pemerintah maupun non pemerintah dalam membantu pelaksanaan program Kampung Keluarga Berkualitas Kelapa Dua Wetan.

Jim Ife (2008) dalam kajian pengembangan Masyarakat (*community development*), aspek modal sosial sering kali diabaikan karena ketersediaan sumber daya materi yang dianggap lebih penting untuk kesuksesan program pemerintah. Namun, modal sosial berbeda dari modal materi atau sumber daya lainnya yang dapat dihitung nilai materinya. Modal sosial memiliki peran yang berbeda dalam mengembangkan dan memberdayakan masyarakat. Modal sosial merupakan aspek penting yang perlu dikenali, dikembangkan, dan diintervensi untuk optimalisasi efektivitas dan efisiensi program Kampung Keluarga Berkualitas di Kelurahan Kelapa Dua Wetan. Dengan demikian, kesejahteraan dan kemandirian hidup masyarakat Kampung Keluarga Berkualitas dapat meningkatkan masyarakat dalam berperan aktif dalam proses pembangunan daerah dan nasional.

Dalam implementasinya, kebijakan Kampung Keluarga Berkualitas harus melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintahan yang ada di semua tingkatan seperti pemerintah kota, kecamatan, kelurahan, RT, dan RW, masyarakat sipil

organisasi yang ada, hingga sektor swasta. Program Kampung Keluarga Berkualitas dirancang sebagai program pemberdayaan masyarakat yang bersifat kolaboratif, karena selain dapat mengentaskan kemiskinan dan mendekatkan Pembangunan kepada masyarakat, juga melibatkan semua sektor Pembangunan. Dengan melakukan *collaborative governance* antara pemerintah kota, *Civil Society Organizations* (CSO), sektor swasta dan masyarakat dapat menghasilkan kekuatan besar dalam membantu program Kampung Keluarga Berkualitas di Kelurahan Kelapa Dua Wetan mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Konsep *collaborative governance* merupakan strategi baru dalam sistem tata kelola pemerintahan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan aparaturnya pemerintah untuk membuat keputusan bersama yang dirumuskan melalui sebuah forum (Ansell and Gash, 2007).

Thomson dan Perry dalam Islamy (2018) mengemukakan *collaborative governance* merupakan metode untuk menyelesaikan dan memberikan solusi atas masalah konflik sosial yang kronis oleh para pemangku kepentingan. Selain itu, *collaborative governance* ini juga digunakan untuk merumuskan rencana Pembangunan daerah melalui organisasi mandiri (*self-organization*) serta melibatkan para pemangku kepentingan yang kreatif, memiliki ide-ide cemerlang, dan memberikan keunikan untuk kebijakan perlindungan lingkungan. Hal ini menyangkut pada pelaksanaan program Kampung Keluarga Berkualitas yang melibatkan peran kelompok kerja di Kelurahan Kelapa Dua Wetan mengenai kebersamaan, dan norma sosial yang kuat sehingga dapat memperkuat kolaborasi, mudah berkomunikasi dalam bertukar informasi, serta komitmen yang dibangun



untuk bekerja sama dalam mengatasi masalah dan mencapai tujuan bersama. Dengan membangun sosial yang kuat antara masyarakat, kelompok, pemerintah, dan sektor swasta, program Kampung Keluarga Berkualitas di Kelurahan Kelapa Dua Wetan akan dapat lebih efektif dalam menyampaikan informasi, merancang solusi bersama, dan meningkatkan kepercayaan, menciptakan lingkungan, dimana kolaborasi dapat berkembang dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Kampung Keluarga Berkualitas di Kelurahan Kelapa Dua Wetan sudah berdiri sejak tahun 2018, namun hingga kini klasifikasi yang dimiliki masih berstatus berkembang. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam mencapai tujuan optimal dari program tersebut. Meskipun telah berjalan selama beberapa tahun, berbagai faktor masih menghambat pencapaian status Kampung Keluarga Berkualitas yang mandiri. Permasalahan yang muncul dapat berkaitan dengan kurangnya partisipasi masyarakat, kendala dalam pelaksanaan program, atau kerja sama yang dilakukan oleh kelompok kerja yang belum maksimal sehingga berdampak pada komitmen anggota kelompok kerja terhadap pelaksanaan program. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan upaya lebih lanjut dalam meningkatkan kapasitas kelompok kerja, memperkuat modal sosial, serta memastikan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan di Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Kelapa Dua Wetan.

Dalam hal ini didukung oleh penjelasan Putnam dalam Lubis (2001) mengenai modal sosial yang merujuk pada organisasi sosial yang memiliki

kepercayaan sosial, jaringan sosial, dan norma-norma yang menjembatani terciptanya kerja sama dalam komunitas sehingga terjalin kolaborasi yang saling menguntungkan. Hal ini berdampak dalam melakukan kolaborasi antara aktor atau *stakeholder* yang terlibat dan modal sosial memegang peranan penting dalam keberhasilan pengembangan masyarakat. Modal sosial sangat penting untuk komunitas karena dapat memudahkan akses informasi, menjadi media untuk berbagi kekuasaan (*power sharing*), media pengembangan solidaritas, memungkinkan mobilisasi sumber daya yang dimiliki, memungkinkan pencapaian bersama, dan membentuk perilaku kebersamaan dan berorganisasi dalam komunitas (Lesser, 2000).

Modal sosial memegang peran yang sangat penting dalam keberhasilan berbagai inisiatif komunitas karena dapat meningkatkan efisiensi Masyarakat dengan memfasilitasi tindakan yang terkoordinasi (Putnam dalam Lubis, 2001). Modal sosial yang mencakup jaringan hubungan, norma, dan kepercayaan sosial, hal ini dapat berkaitan dengan pelaksanaan *collaborative governance* pada program Kampung Keluarga Berkualitas sebagai faktor kunci yang memungkinkan terjalinnya kerjasama efektif antara berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, sektor swasta, dan Masyarakat. Keberadaan modal sosial yang kuat memungkinkan terciptanya komunikasi yang efektif dan pertukaran informasi yang transparansi di antara para pemangku kepentingan. Hal ini juga memperkuat komitmen bersama dalam mengatasi berbagai permasalahan yang ada, seperti tingginya tingkat kepadatan penduduk dan rendahnya kualitas hidup masyarakat. Dengan memanfaatkan modal sosial, dukungan dari berbagai pihak dan terjalinnya

kolaborasi yang kuat serta dapat merancang solusi bersama yang berkelanjutan sehingga program Kampung Keluarga Berkualitas dapat berjalan lebih optimal dan mencapai tujuan yang diharapkan yaitu meningkatkan kualitas sumber daya dan kesejahteraan keluarga di Kelurahan Kelapa Dua Wetan.

Dalam melaksanakan penelitian yang berjudul “Modal Sosial dalam *Collaborative Governance* pada Program Kampung Keluarga Berkualitas di Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur”, penulis tentunya meninjau penelitian-penelitian terdahulu yang relevan untuk mendukung informasi dan analisis. Penelitian tersebut dijadikan sebagai acuan untuk memastikan penulis dilakukan secara ilmiah dan didukung oleh literatur yang relevan. Penelitian pertama yang dilakukan oleh Dania Dyah Fitrawan (2021) dengan judul “Penguatan Modal Sosial UMKM Batik Jentis Sidoarjo dalam Mempertahankan Usaha di Era Pandemi Covid-19” yang berfokus pada aspek modal sosial yang berkembang di UMKM Batik Jentis Sidoarjo untuk mempertahankan usahanya selama pandemi Covid-19, dengan menggunakan teori modal sosial dari Putnam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan pengambilan data menggunakan teknik *snowball sampling*, dimulai dengan sampel kecil yang kemudian berkembang sampai data yang diperoleh jenuh.

Hasil penelitian ini menunjukkan tiga parameter utama dalam menganalisis penguatan modal sosial di UMKM Batik Jetis selama pandemi, yaitu kepercayaan, jaringan, dan norma. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi tiga bentuk penguatan modal sosial yang terwujud, yaitu: (1) memaksimalkan bantuan dan

dukungan keluarga dalam menjalankan usaha; (2) mengembangkan hubungan kemitraan dengan pihak eksternal; dan (3) mengembangkan relasi dalam paguyuban batik Sidoarjo.

Penelitian kedua dilakukan oleh Nur Laila Meilani (2019) dengan judul “Strategi Penguatan Modal Sosial dalam Pelaksanaan Program Kampung KB di Kabupaten Pelawan dan Kota Pekanbaru, Provinsi Riau” memiliki tujuan mengidentifikasi dan menganalisis kondisi modal sosial yang ada dalam pelaksanaan program Kampung KB di Provinsi Riau. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis interaktif, serta teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Informan dalam wawancara mendalam meliputi: (a) pengurus Kampung KB, (b) Tokoh agama dan tokoh masyarakat di Kampung KB, (c) lurah/kepala desa.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan individu yang membawa semangat altruisme dan keikhlasan sangat menentukan keaktifan Kampung KB tersebut. Selain itu, secara kualitatif ditemukan bahwa faktor yang menentukan keaktifan Kampung KB bukanlah hubungan kekeluargaan atau anggaran, melainkan semangat kolektif dan kesadaran bersama yang menjadi inti kehidupan Kampung KB, baik di perkotaan maupun pedesaan.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Novy Setia Yunas (2019) yang berjudul “*Collaborative Governance* melalui Program Kampung KB di Kabupaten Jombang” berfokus pada implementasi program Kampung KB di Kabupaten Jombang. Penelitian ini merupakan saripati dari penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Dalam prosesnya, teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi

wawancara mendalam dan observasi lapangan. Penelitian ini dilaksanakan di tiga desa yang dicanangkan sebagai Kampung KB di Kabupaten Jombang, yaitu Dusun Munggut, Kecamatan Ngusikan; Desa Plabuhan, Kecamatan Plandaan; dan Desa Pulonasir, Kecamatan Bareng. Ketiga Lokasi ini merupakan Kampung KB pertama di Jombang yang dicanangkan pada tahun 2016 dan 2017. Keempat desa ini memiliki karakteristik yang sama, yakni terletak di daerah terpencil dengan akses kesehatan dan pendidikan yang minim.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan Kampung KB secara umum berkontribusi signifikan terhadap penguatan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, CSO, sektor swasta, dan masyarakat menciptakan kekuatan besar yang memungkinkan program ini mencapai tujuannya, meskipun terdapat beberapa kendala dalam hal anggaran dan fungsi koordinatif.

Berdasarkan penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki beberapa kesamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Kesamaan pada penelitian ini, terletak pada fokus penelitian mengenai modal sosial dan penelitian penggunaan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Selain itu, teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.

Perbedaan dalam penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya terletak pada lokasi penelitian serta aspek modal sosial yang diteliti. Aspek yang diteliti mencakup kepercayaan, jejaring, dan norma. Aspek-aspek ini menjadi dasar dalam pembentukan interaksi antar individu dalam suatu kelompok. Interaksi sosial

digunakan sebagai tolak ukur perkembangan modal sosial dalam penerapan *collaborative governance*. Hingga saat ini, belum ada penelitian secara spesifik mengkaji modal sosial dalam *collaborative governance* pada Kampung Keluarga Berkualitas. Hal ini menunjukkan pentingnya modal sosial dalam membangun komitmen bersama dan memperkuat kolaborasi untuk mengatasi masalah dan mencapai tujuan bersama dalam kerangka *collaborative governance*.

Penelitian yang dilakukan menggunakan perspektif pekerjaan sosial dan didasarkan pada isu-isu yang ditemukan oleh peneliti di lapangan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi alternatif atau rencana intervensi berdasarkan analisis masalah, analisis kebutuhan, dan analisis sumber yang dilakukan untuk dapat mengatasi permasalahan yang ditemukan, serta merancang program usulan untuk dapat dipertimbangkan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

Berdasarkan sumber penelitian terdahulu, hasil peninjauan, dan studi literatur yang telah dilakukan, bahwa penelitian mengenai modal sosial dalam *collaborative governance* pada Kampung Keluarga Berkualitas di Kelurahan Kelapa Dua Wetan belum terdapat penelitian yang secara spesifik mengkaji penelitian yang dilakukan. Dalam hal ini menjadi perhatian peneliti untuk mengangkat judul “Modal Sosial dalam *Collaborative Governance* pada Kampung Keluarga Berkualitas di Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur”. Kampung Keluarga Berkualitas sebagai program pengembangan masyarakat yang berbasis partisipasi aktif dari komunitas lokal yang bertujuan mengatasi permasalahan masyarakat berbasis keluarga. Dengan mengetahui modal sosial yang dilakukan oleh Kelompok Kerja dalam membangun dan menjaga

*collaborative governance*, hal ini akan berdampak pada kolaborasi yang dilakukan oleh Kampung Keluarga Berkualitas dengan *stakeholder* dalam melakukan sinergi untuk mewujudkan tujuan keluarga sejahtera.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, maka rumusan masalah yang diangkat oleh peneliti adalah “Bagaimana Modal Sosial dalam *Collaborative Governance* pada Program Kampung Keluarga Berkualitas di Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Jakarta Timur”. Adapun hasil uraian latar belakang yang dijadikan rumusan masalah penelitian dirinci yang menjadi fokus penelitian, sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik informan?
2. Bagaimana membangun kepercayaan dalam melakukan *collaborative governance* pada program Kampung Keluarga Berkualitas?
3. Bagaimana jejaring yang dilakukan dalam *collaborative governance* pada program Kampung Keluarga Berkualitas?
4. Bagaimana norma yang dilakukan dalam *collaborative governance* pada Program Kampung Keluarga Berkualitas?
5. Bagaimana harapan dari pelaksanaan program Kampung Keluarga Berkualitas dalam *collaborative governance* untuk dapat meningkatkan program-program yang sudah dilakukan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah ditentukan, maka Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan modal sosial dalam *Collaborative Governance* pada Kampung Keluarga Berkualitas di Kelurahan Kelapa Dua Wetan,

Kecamatan Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur. Berdasarkan tujuan utama tersebut, tujuan khusus dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menggambarkan penelitian, sebagai berikut:

1. Karakteristik informan
2. Membangun kepercayaan dalam melakukan *collaborative governance* pada program Kampung Keluarga Berkualitas.
3. Jejaring yang dilakukan dalam *collaborative governance* pada program Kampung Keluarga Berkualitas.
4. Norma yang dilakukan dalam *collaborative governance* pada Program Kampung Keluarga Berkualitas.
5. Harapan dari pelaksanaan program Kampung Keluarga Berkualitas dalam *collaborative governance* untuk dapat meningkatkan program-program yang sudah dilakukan.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dalam hasil penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat memberikan kebermanfaat secara teoritis dan praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang diperoleh dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat untuk pengemban ilmu praktik pekerjaan sosial di masyarakat khususnya dibidang pengembangan masyarakat (*community development*) dalam aspek modal sosial melalui pendekatan *collaborative governance*.

2. Manfaat Praktis



Hasil penelitian ini diharapkan secara praktis dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi instansi maupun pihak yang terlibat dalam penguatan modal sosial dengan aspek norma sosial, kepercayaan, jejaring untuk melakukan *collaborative governance* dalam pengembangan secara berkelanjutan program Kampung Keluarga Berkualitas.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

**BAB I PENDAHULUAN** menguraikan latar belakang isu masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II KAJIAN KONSEPTUAL** menguraikan penelitian terdahulu dan teori yang relevan dengan penelitian.

**BAB III METODE PENELITIAN** menguraikan penelitian terdahulu dan teori yang relevan dengan penelitian.

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN,** menguraikan gambaran lokasi penelitian, hasil penelitian dan pembahasan.

**BAB V USULAN PROGRAM,** menguraikan dasar pemikiran, nama program, tujuan program, sarana program, pelaksana program, metode dan teknik, kegiatan yang dilakukan, rencana anggaran biaya, langkah-langkah pelaksanaan, analisis kelayakan program, dan indikator keberhasilan.

**BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN,** memuat simpulan dan saran.

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR LAMPIRAN**